**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP
KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh: Asra Afifah Afis
Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.
Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H.
Alamat: Jalan Kembang Harapan, Kec. Sail. Pekanbaru
Email: afifahasra79@gmailcom – Telepon: 0896-9950-0291

ABSTRACT

This research raises the background of the problem regarding Law Number 19 of 2019 regarding amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which discusses the challenges, first, the influence of Law Number 19 of 2019 on the performance of the Corruption Eradication Commission. Second, regarding the weaknesses of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 compared to Law Number 30 of 2002 and its impact on law enforcement officers. Third, regarding the legal reforms needed to optimize the duties and responsibilities of the Corruption Eradication Commission.

This study aims to: first, to analyze the effect of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission on the performance of the Corruption Eradication Commission. Second, to find out the weaknesses of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 compared to Law Number 30 of 2002 and its impact on law enforcement. Third, to find out the legal reforms needed to optimize the duties and responsibilities of the Corruption Eradication Commission.

This research uses normative legal research methods, namely library law research. In connection with the type of research used, namely normative research, the approach used is a statutory approach and a conceptual approach. In this study the authors conducted research on legal principles, namely the legal principle of proportionality is a legal principle that seeks to balance the actions taken with the goals to be achieved.

From the results of this study, it can be concluded that the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, which was originally intended to improve the performance of the KPK, can actually be said otherwise. The KPK is no longer an independent institution based on Article 1 paragraph 3 because it has been supervised by an executive agency. Board. The KPK supervisors become an organizational unit with the KPK (Article 21 paragraph 1) so that the institutions are not independent because they are still one institution so that the check and balance function is very doubtful. (Article 37E paragraph 1 and paragraph 10).

Keywords: KPK – Analysis Law Number 19 of 2019- KPK performance.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.¹ Istilah korupsi secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.³ Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Landasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur banyak hal tentang komisi ini. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, telah ditambahkan banyak hal ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan yang menangani kasus korupsi. Undang-undang tersebut pada dasarnya bersifat menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang telah ada dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.⁴

Sejak berdirinya, secara garis besar kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi 5 bidang yakni:⁵

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁶

Namun Undang-Undang ini kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan sudah tidak terlalu efektif dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia. Sejak pergantian peraturan perundang-undangan tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ini banyak indikasi pelemahan yang dirasakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam lembaganya, yang mana dalam proses perumusan hingga pengesahannya tidak mengindahkan aspirasi publik.

Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, muncul dualisme kepemimpinan di KPK khususnya yang berkaitan dengan langkah penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Pertanggungjawaban terhadap proses penyadapan yang dilakukan oleh penyidik tidak saja disampaikan kepada pimpinan

¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 137.

² Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Press, Jakarta: 2017, hlm. 1.

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 255.

⁴ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, 2017, hlm 389.

⁵ Syaiful Ahmad Dinar, *Komisi Pemberantasan Korupsi dan Korupsi*, Cintya Press, Jakarta: 2012, hlm. 96.

⁶ Mansur Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 323.

KPK, namun juga kepada Dewan Pengawas.⁷

ICW menilai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi fungsi dan kinerja KPK terus menunjukkan tren yang menurun. Walaupun secara perlahan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia mengalami kenaikan skor dimana Indonesia masih berada pada peringkat 85 dengan skor 40 di tahun 2019, namun secara tren kenaikan tersebut cukup lambat. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan melemahkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menuangkan tulisan yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apa saja kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan apa imbasnya bagi penegakan hukum?
3. Bagaimana pembaharuan hukum yang diperlukan dalam mengoptimalkan tugas dan tanggungjawab Komisi Pemberantasan Korupsi?

⁷ *Ibid*, hlm 362.

⁸ Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia, “Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia*, Jakarta, 2020, hlm. 4.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Untuk mengetahui kelemahan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan imbasnya bagi penegakan hukum;
- c. Untuk menganalisis pembaharuan hukum yang diperlukan dalam mengoptimalkan tugas dan tanggungjawab Komisi Pemberantasan Korupsi?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam analisis terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk

memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹¹

2. Sistem Hukum (*Legal System*)

Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.¹²

Persoalan penanganan tindak pidana korupsi dapat dilihat dengan menggunakan

pendekatan *systemic approach*.¹³ Menurut Friedman, sistem hukum haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan atau keterpaduan (*intergrated*) yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaruan (reformasi) terhadap tiga unsur atau komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴

Ketiga unsur (komponen) dalam sistem hukum tersebut dijelaskan oleh Friedman sebagai berikut. Pertama, sistem hukum mempunyai struktur. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum.

Komponen kedua dalam sistem hukum adalah substansinya yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahkan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan hukum yang relevan.
2. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 115.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm. 9.

¹² Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung: 2003, hlm. 151.

¹³ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2019, hlm. 44.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 46

¹⁵ Suhartoyo, *Loc.cit*.

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁶

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷
4. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dan mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu asas hukum proporsionalitas adalah sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Sumber Data

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Dalam hukum primer

yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.²⁰

- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.²¹

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal

¹⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Diana Khairani Sofyan, Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BAPPEDA, *Malikussaleh Industrial Engineering Journal*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 18.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

²⁰ Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.103

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm.50.

maupun data melalui naskah resmi yang ada.²²

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Adapun arti dari analisis ini adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam sebuah peraturan perundang-undangan, literatur atau buku dan media masa.²³

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*Corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruption*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu Bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian.²⁴

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum*, yang

dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.²⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”²⁷, yang secara harfiah berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman.

Prodjodikoro mendefinisikan istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan.²⁸

3. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

a. Faktor Internal

- 1) sifat/kepribadian yang rakus;

²² Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

²³ <http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisis-isi-reabilitas-dan-validasi-dalam-metode-penelitian-komunikasi/20-12-2017>, diakses, tanggal, 12 Desember 2019.

²⁴ Adami Chazawi, *Loc. cit.*

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 9.

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 47.

²⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

- 2) kurangnya akhlak dan moral;
- 3) iman yang lemah;
- 4) penghasilan yang tidak mencukupi;
- 5) menuruti gaya hidup;
- 6) tidak mau sengsara dalam bekerja.

b. Faktor Eksternal

- 1) faktor ekonomi;
- 2) faktor organisasi;
- 3) faktor politik;
- 4) faktor perilaku masyarakat;
- 5) faktor hukum.

4. Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia

Tindakan korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman penjajahan Belanda, bentuk korupsi pada saat itu adalah kasus suap atau memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri. Hal ini terus berlanjut sampai era orde baru dan makin berkembang pada saat masa reformasi.

Namun penanganan kasus korupsi pada saat itu masih sangat lamban. Maka, pemerintah membentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Ciri-Ciri Korupsi

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya;
- e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
- g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- h. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban.

6. Jenis-Jenis Korupsi

a) Menurut Para Ahli

Alat mengembangkan korupsi menjadi tujuh jenis, yaitu:

- 1) Korupsi transaktif;
- 2) Korupsi ekstorsif;
- 3) Korupsi intensif;
- 4) Korupsi nepotistic;
- 5) Korupsi otogenik;
- 6) Korupsi suportif;
- 7) Korupsi defensive.

b) Jenis-Jenis Korupsi Menuut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi dan dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Terkait kerugian keuangan Negara;
- 2) Terkait kasus suap menyuap;
- 3) Terkait penggelapan dalam jabatan;
- 4) Terkait perbuatan pemerasan;
- 5) Terkait melakukan perbuatan curang;
- 6) Terkait benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Terkait penerimaan gratifikasi.

B. Landasan Yuridis Tindak Pidana Korupsi

1. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana korupsi digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena ketentuannya turut diatur secara khusus oleh peraturan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 17-35

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Istilah “pemberantasan” berasal dari kata “berantas” yang secara harfiah berarti “membasmi; memusnahkan”. Dari segi bahasa, kata ini biasanya digunakan untuk penyakit. Pemberantasan diartikan sebagai proses, cara untuk memusnahkan suatu penyakit. Berbeda dengan pilihan kata berantas ini, sebagai perbandingan dalam konvensi PBB tentang judulnya hanya menggunakan kata “*against*” yang berarti menentang (melawan).³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 angka 3 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai

dengan undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Sejarah Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi

Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Upaya-upaya tersebut adalah:³¹

- a. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
- b. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- c. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah.
- d. Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
- e. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.
- f. Pada tahun 1999 di bentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).
- g. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³²

3. Asas-asas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi

Terdapat 6 asas yang menjadi landasan Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Kemang Studio Aksara, Jakarta: 2016, hlm. 163.

³¹ Achmad Badjuri, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Universitas Stikubank, Volume 18 No. 1 Maret 2011, hlm. 87.

³² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Op. Cit.*, 2018, hlm. 154.

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu:³³

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

5. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain tugas dan kewenangan, KPK juga mempunyai kewajiban. Kewajibannya meliputi:³⁴

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya berdasarkan asas;
- f. Menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Strategi Nasional Tindakan Antikorupsi

1. Pencegahan (Preventif)

Susunan stranas PPK dalam bidang pencegahan untuk periode 2012-2025 adalah:

- a) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan pelayanan publik;
- b) Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara;
- c) Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan pertahanan yang bebas korupsi;
- d) Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi;
- e) Penguatan komitmen antikorupsi di semua elemen pemerintahan;
- f) Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi jabatan publik melalui asesmen integritas dan pakta integritas;
- g) Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan antikorupsi secara nasional;
- h) Peningkatan pengawasan internal dan eksternal;
- i) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
- j) Pembinaan sistem pemerintahan melalui reformasi birokrasi;
- k) Pelaksanaan *e-government*.

2. Penegakan Hukum (*Law Enforcing*)

Stranas PPK di bidang penegakan hukum untuk periode 2012-2025 adalah:

- a) Memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerja sama antar

³³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tipikor;
- b) Memperkuat sarana pendukung berbasis TI untuk koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam penanganan kasus dan proses peradilan; dan
 - c) Penerapan *zero tolerance* pada tipikor dan sanksi hukum yang lebih tegas di semua strata pemerintahan.

3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Stranas PPK di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk periode 2012-2025 adalah:

- a) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam;
- b) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana;
- c) Mekanisme mentoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan inkonsisten;
- d) Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum;
- e) Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya;
- f) Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas daerah;
- g) Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi terkait perlimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

4. Kerjasama Internasional Dan Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Berikut langkah pemerintah dalam Stranas PPK di bidang kerja sama

internasional dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, adalah:

- a) Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan fokus pada pemantapan otoritas pusat di kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam proses penyelamatan aset, kerja sama internasional, serta pelaksanaan ekstradisi;
- b) Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan internasional;
- c) Pelatihan dan bantuan teknis diantara lembaga penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi;
- d) Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan penyelamatan aset berikut implementasinya;
- e) Peningkatan kerja sama internasional dengan negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi.

5. Pendidikan Dan Budaya Antikorupsi

Langkah-langkah stranas PPK di bidang pendidikan antikorupsi, meliputi:

- a) Komunikasi dalam pendidikan budaya antikorupsi, ditunjukkan dengan diberikannya materi dengan cara penyampaian pendidikan dan kampanye antikorupsi pada masyarakat yang efektif;
- b) Pengembangan sistem nilai dan sikap antikorupsi dalam berbagai aktivitas kehidupan di tiga pilar PPK;
- c) Pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan nilai-nilai antikorupsi, kejujuran, keterbukaan, dan integrasi di berbagai aktivitas dunia pendidikan;
- d) Kampanye antikorupsi secara menyeluruh dan terencana;
- e) Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangka PPK.

6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Stranas PPK di bidang mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi adalah:

- a) Penyusunan dan penerapan standar informasi, dokumentasi, dan pelaporan para pihak terkait, khususnya sistem pelaporan yang berbasis TI;
- b) Mekanisme pelaporan PPK nasional secara terpadu;
- c) Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya PPK, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan;
- d) Pengawasan dan pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk mekanisme verifikasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan PPK;
- e) Perluasan akses informasi menyangkut pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Banyak pihak memprotes revisi UU KPK yang baru karena dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Beberapa hal krusial dalam revisi UU yang dianggap mengancam keberadaan KPK di antaranya adalah independensi KPK, pembentukan Dewan Pengawas, izin penyadapan, dan kewenangan penghentian perkara. UU KPK memang perlu direvisi demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini dinilai belum tepat karena penggunaan UU lama pun masih cukup efektif dalam menangani kasus tipikor. Revisi yang dilakukan oleh DPR sangatlah tidak

relevan dengan yang dibutuhkan KPK itu sendiri.³⁵

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori penegakan hukum, penggunaan teori ini dinilai tepat karena membahas tentang kelemahan-kelemahan yang terjadi di KPK pasca ditetapkannya UU No. 19 Tahun 2019, maka teori penegakan hukum harus digunakan untuk mengembalikan pelaksanaan hukum yang ada di KPK sebagaimana semestinya dan tidak menjadikan KPK lembaga yang dinilai buruk dan gagal oleh masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

B. Kelemahan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Imbasnya Bagi Penegakan Hukum

1. Kelemahan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Adapun poin-poin revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah, sebagai berikut:

- 1) Mengubah kedudukan KPK yang semula sebagai lembaga independen menjadi lembaga penegak hukum pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen (Pasal 1 Angka 3 UU No. 19 Tahun 2019).
- 2) Dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang independensinya perlu dipertanyakan karena Dewan Pengawas pada awalnya dipilih oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 37E ayat (9) UU No. 19 Tahun 2019).
- 3) Pelaksanaan fungsi penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang

³⁵ Wawan Heru Suyatmiko dan Alvin Nicola, "Menakar Lembaga Anti Korupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Antikorupsi Integritas* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 38.

semakin rumit, salah satunya karena harus seizin tertulis dari Dewan Pengawas (Pasal 47 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019).

- 4) Kaum muda kehilangan kesempatan untuk menjadi pimpinan KPK (Pasal 29 huruf e UU No. 19 Tahun 2019).
- 5) Perkara besar dengan tingkat kerumitan tertentu berpotensi dihentikan (Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019).
- 6) Tertutupnya kemungkinan KPK untuk membuka kantor perwakilan.
- 7) Pegawai KPK ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara, yang menjadikan pegawai KPK harus patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN.

2. Dampak Melemahnya Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bagi Penegakan Hukum

Revisi undang-undang KPK yang dilakukan dan ada indikasi pelemahan terhadap kinerja KPK tentu saja memberikan dampak kepada penegakan hukum Indonesia, salah satunya memberikan citra buruk kepada penegakan hukum Indonesia dan menjadikan masyarakat tidak lagi percaya kepada hukum salah satunya pada bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah dinilai gagal.

Dampak yang ditimbulkan karena krisis kepercayaan dalam masyarakat ini tentu saja menjadikan penegakan hukum pada bidang pemberantasan korupsi banyak mengalami hambatan dan memberikan KPK beban baru, yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum Indonesia.

C. Pembaharuan Hukum Yang Diperlukan Untuk Mengoptimalkan Tugas dan Tanggungjawab Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan

perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan *Grundnorm*. Bagi bangsa Indonesia, *Grundnorm* merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. *Grundnorm* merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan.³⁶

Karena dalam pembahasan ini menyangkut tentang bagaimana bentuk peraturan yang ideal, maka penulis menggunakan pendekatan sistem hukum (*legal system*) karena dalam pendekatan ini terdapat 2 unsur yaitu *output* (keluaran) dan *input* (masukan). Dalam pendekatan ini yang dimaksud dengan *input* adalah tuntutan yang memancar yang bersumber dari masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan *output* adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial. Maka, yang menjadi inti dari sistem adalah bagaimana cara mengubah *input* menjadi *output* yang nantinya akan memenuhi tuntutan-tuntutan dari masyarakat sehingga menjadikan masyarakat kembali percaya dan patuh akan hukum dan penegak hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Revisi undang-undang KPK memberikan pengaruh terhadap kinerja KPK, yaitu cenderung melemahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena penetapannya yang dinilai tergesa-gesa juga tidak mengikutsertakan KPK dalam pembahasan RUU ini dan revisi ini juga menjadikan KPK lembaga negara yang tidak lagi independen karena sudah berada di bawah naungan lembaga eksekutif.
2. Banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Setidaknya ada tujuh pasal yang dinilai

³⁶ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia", *Perspektif*, STAI Muhammadiyah Tulungagung Volume XXI No. 3 Edisi September 2016, hlm. 220

dapat melemahkan kinerja KPK, salah satunya adalah dibentuknya Dewan Pengawas yang tugas dan wewenangnya cenderung menjadikan KPK bergerak lamban dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Padahal sebenarnya Dewan Pengawas tidak terlalu dibutuhkan dalam lembaga ini.

3. Pembaharuan hukum yang diperlukan untuk mengoptimalkan tugas dan tanggungjawab KPK berupa pembaharuan yang dapat meningkatkan kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai lembaga negara independen harusnya tidak diganggu dengan adanya revisi undang-undang yang melemahkan dan menghambat gerak mereka dalam memberantas korupsi.

B. Saran

1. Dengan menurunnya kinerja KPK saat ini, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan mengikutsertakan KPK dalam pembahasannya, karena KPK lah yang lebih tau apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kinerja di lembaganya.
2. Banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dinilai melemahkan KPK, maka saran dari penulis sebaiknya pasal tersebut dikaji ulang dan khusus terkait tugas dan wewenang Dewan Pengawas yang menyangkut perizinan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dapat menghambat gerak KPK sebaiknya dicabut atau dikembalikan ke peraturan sebelumnya
3. Kepada pakar Hukum Pidana dan pemerintah diharapkan dapat memberikan ide, gagasan, dan inovasi-inovasi untuk aturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik lagi, khususnya pada undang-undang KPK karena KPK berperan sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Apabila aturan yang ada dalam KPK itu sendiri buruk bukan tidak mungkin pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia juga akan semakin buruk.

Serta pembaharuan hukum yang diberikan seharusnya tidak mengganggu kinerja KPK dalam bertugas memberantas tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Asshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Chazawi, Adam. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dinar, Syaiful Ahmad. 2012. *Komisi Pemberantasan Korupsi dan Korupsi*. Jakarta: Cintya Press.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua*. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartayasa, Mansur. 2017. *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Jakarta: Kemang Studio Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rasyidi, Lili. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.

Rosikah, Chatrina Darul, dan Dessy Marliani Listianingsih. 2018. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitri, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.

Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Surachmin, dan Suhandi Cahaya. 2010. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Kamus/Jurnal/Skripsi

Badjuri, Achmad. 2011. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 18 No. 1 Maret.

Sofyan, Diana Khairani. 2013. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BAPPEDA. *Malikussaleh Industrial Engineering Journal*. Volume 2 Nomor 1.

Suyatmiko, Wawan Heru dan Alvin Nicola. 2019. "Menakar Lembaga Anti Korupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Volume 5 Nomor 2.

Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia.

2020. "Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia*. Jakarta.

Febriansyah, Ferry Irawan Febriansyah. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Perspektif, STAI Muhammadiyah Tulungagung*. Volume XXI No. 3 Edisi September 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

<http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/mode-analisis-isi-realibilitas-dan-validasi-dalam-metode-penelitian-komunikasi/20-12-2017>, diakses, tanggal, 12 Desember 2019